



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 25 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

UNIT KERJA : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ASMAR PANJAITAN
2. Jabatan : KEPALA SATGAS POL. PP KEC. KEMAYORAN
3. NHK : 439068

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.410.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m²/33 m² di KAB / KOTA KOTA
TANGERANG , HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 160 m²/116 m² di KAB / KOTA KOTA
TANGERANG , HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m²/29 m² di KAB / KOTA KOTA
TANGERANG , HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 65 m²/45 m² di KAB / KOTA KOTA
TANGERANG , HASIL SENDIRI Rp. 230.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m²/36 m² di KAB / KOTA KOTA
TANGERANG , HASIL SENDIRI Rp. 230.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 112 m²/40 m² di KAB / KOTA KOTA
TANGERANG , HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 107 m²/29 m² di KAB / KOTA KOTA
TANGERANG , HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 26 m²/52 m² di KAB / KOTA KOTA
TANGERANG , HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
9. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m²/29 m² di KAB / KOTA KOTA
TANGERANG , HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 86.000.000



1.	MOTOR, HONDA NF 100 LD Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp.	
	2.000.000	
2.	MOBIL, TOYOTA AVANZA Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp.	
	80.000.000	
3.	MOTOR, HONDA NC11 AB3C/T Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp.	
	4.000.000	
C.	HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.
D.	SURAT BERHARGA	Rp.
E.	KAS DAN SETARA KAS	Rp.
F.	HARTA LAINNYA	Rp.
Sub Total		Rp.
		2.786.000.000
III. HUTANG		Rp.
		55.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)		Rp.
		2.731.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkp.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkp.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.